

Studi Terpercaya

Memantau yurisdiksi berkelanjutan dalam produksi komoditas di Indonesia: Perkembangan dan langkah-langkah selanjutnya

Ringkasan

- Melalui proses konsultasi multi-pemangku kepentingan yang komprehensif, Studi Terpercaya telah mengembangkan 22 indikator untuk memantau perkembangan yurisdiksi menuju produksi komoditas berkelanjutan di Indonesia. Indikator-indikator tersebut mewakili empat pilar utama produksi komoditas berkelanjutan: lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan tata kelola.
- Indikator-indikator ini dikembangkan berdasarkan hukum Indonesia. Mereka sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mendukung pencapaian komitmen internasional Indonesia seperti yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan melengkapi sistem yang ada untuk produksi komoditas berkelanjutan dan yang sesuai hukum antara lain ISPO¹ dan SLVK².
- Konsultasi terakhir menggarisbawahi bidang-bidang yang perlu perhatian lebih lanjut. Bidang-bidang itu antara lain: transparansi; keadilan (terkait dengan gender, pekerja anak dan legalitas petani); penggunaan lahan yang tidak produktif; penggunaan kawasan hutan secara legal; dan menetapkan batas waktu untuk deforestasi terkait komoditas.
- Beberapa prioritas ke depan termasuk pengujian indikator di tingkat Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dan pengumpulan data pendukung, mengeksplorasi opsi-opsi tuan rumah kelembagaan untuk Terpercaya, dan membahas potensi penggunaan indikator untuk menginformasikan dialog UE-Indonesia tentang keberlanjutan dan perdagangan.

¹ Standar Indonesian Sustainable Palm Oil.

² Sistem Verifikasi Legalitas Kayu - sistem jaminan legalitas kayu yang dioperasikan berdasarkan Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement.

Pendahuluan

Studi Terpercaya yang dipimpin oleh European Forest Institute (EFI) dan Inovasi Bumi (INOBU) melakukan penilaian terhadap pendekatan yurisdiksi untuk menunjukkan keberlanjutan produksi komoditas di Indonesia (lihat Tabel 1). Berkenaan dengan nama, studi ini memilih kata *terpercaya*, yang berarti 'dapat dipercaya', karena tujuannya adalah menghasilkan informasi dan analisis yang kredibel.

Briefing ini menguraikan bagaimana proyek telah mengembangkan serangkaian indikator untuk melacak perkembangan yurisdiksi menuju keberlanjutan, melalui proses yang mencakup masukan dari Pemerintah Indonesia, sektor swasta dan masyarakat sipil. Briefing juga membahas langkah-langkah selanjutnya untuk menguji dan menyempurnakan indikator, serta opsi untuk tuan rumah inisiatif ini dan menerapkan sistem pemantauan kinerja yurisdiksi. Briefing diakhiri dengan menggambarkan potensi sistem tersebut untuk mempromosikan produksi dan perdagangan komoditas berkelanjutan.

Tabel 1. Apa itu Terpercaya, dan apa yang bukan Terpercaya

| Penjelasan Terpercaya | |
|----------------------------|--|
| Apa yang bukan? | <ul style="list-style-type: none">• Skema sertifikasi lain.• Pengganti untuk, atau bersaing dengan, skema sertifikasi yang ada. |
| Apa itu Terpercaya? | <ul style="list-style-type: none">• Pelengkap sistem sertifikasi yang ada untuk menyediakan insentif bagi Pemerintah Daerah agar membangun lingkungan yang memungkinkan produksi komoditas berkelanjutan.• Alat komunikasi untuk menunjukkan keberlanjutan di tingkat Pemerintah Daerah, termasuk perkembangan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan komitmen berdasarkan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.• (Usulan) Definisi keberlanjutan di tingkat yurisdiksi.• Suatu cara untuk mengukur dan memverifikasi keberlanjutan di tingkat yurisdiksi. |

Menyusun indikator Terpercaya

Dua puluh dua indikator keberlanjutan yurisdiksi (lihat Gambar 1) diidentifikasi melalui tinjauan hukum dan studi pustaka yang komprehensif, dilengkapi dengan empat pertemuan multi-pihak yang duduk dalam Komite Penasihat Terpercaya, diskusi terfokus, dan konsultasi dengan pakar.

Gambar 1. Indikator Terpercaya untuk melacak perkembangan menuju yurisdiksi berkelanjutan



* Standar Indonesian Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Tinjauan hukum dan studi pustaka difokuskan untuk mengidentifikasi indikator yang sejalan dengan persyaratan sosial dan lingkungan dari skema sertifikasi komoditas berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan Indonesia. Pemilihan indikator juga mempertimbangkan wewenang yang didelegasikan pada Pemerintah Daerah dan tanggung jawab mereka untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya pemerintah di bidang terkait.

Pengembangan dan kesepakatan mengenai indikator berlangsung pada rapat Komite Penasihat Terpercaya, yang memiliki perwakilan dari Pemerintah Indonesia, sektor swasta dan masyarakat sipil, termasuk Roundtable on Sustainable Palm Oil Production (lihat Tabel 2). Melalui empat rapat komite, konsensus tercapai dalam wujud indikator dan potensi penggunaannya (lihat [Briefing Terpercaya 4](#) untuk detail lebih lanjut). Anggota Komite Penasihat Terpercaya juga mengidentifikasi beberapa bidang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. (lihat Tabel 3).



Kebun kelapa sawit di tepi hutan hujan tropis di Kalimantan Barat, Indonesia

Foto: Nanang Sujana/
CIFOR

Akhirnya, indeks kinerja keberlanjutan yurisdiksi diusulkan untuk menyederhanakan evaluasi Pemerintah Daerah. Untuk mengembangkan indeks semacam itu, masing-masing indikator akan dipertimbangkan untuk memfasilitasi konsolidasi dan evaluasi kinerja berdasarkan kategori pencapaian/perkembangan. Hal itu dapat menyediakan informasi yang lebih sederhana kepada pembeli (*buyer*), konsumen dan pemerintah dari konsumen komoditas dalam mengidentifikasi Pemerintah Daerah berkelanjutan dan juga Pemerintah Daerah yang perlu dukungan. Informasi juga akan berguna untuk menginformasikan Pemerintah Pusat dan Daerah tentang perkembangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Susunan Komite Penasihat Terpercaya

| | |
|-------------------------|---|
| Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator bidang Perekonomian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Pertanian • Kementerian Dalam Negeri |
| Sektor swasta | <ul style="list-style-type: none"> • Pepsico • Unilever • Golden Agri-Resources |
| Masyarakat Sipil | <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) • Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) • Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) • Greenpeace • Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) • World Resources Institute (WRI) • The Sustainable Trade Initiative (IDH) • Auriga |

Tabel 3. Bidang yang diidentifikasi pemangku kepentingan untuk perhatian lebih lanjut

| Bidang | Pandangan anggota-anggota Komite Penasehat Terpercaya |
|--|--|
| Transparansi | Transparansi dalam tata kelola dianggap sebagai komponen penting dalam pemantauan dan peningkatan kinerja yurisdiksi. Dimasukkannya indikator transparansi tertentu akan memungkinkan aspek tata kelola yang penting ini untuk dilacak dan diberi insentif. |
| Keadilan | Keadilan harus lebih banyak dipertimbangkan terkait dengan isu-isu seperti kesetaraan gender, pekerja anak dan legalitas petani sesuai dengan tata ruang. |
| Penggunaan lahan yang tidak produktif | Harus ada pertimbangan mengenai indikator yang mencerminkan rasio area produktif dan tidak produktif di dalam dan di luar lahan hutan untuk mendorong penggunaan area yang tidak produktif dan mengurangi deforestasi. |
| Penggunaan lahan hutan secara legal | Banyak perkebunan kelapa sawit berada di lahan hutan dan indikator Terpercaya bisa melacak perkembangan dengan mengembalikan tanah tersebut ke fungsi yang dimaksud melalui program kehutanan sosial dan lainnya. |
| Batas waktu deforestasi | Agar lebih mudah membedakan perkebunan 'baik' dan 'buruk', batas waktu untuk deforestasi dapat didefinisikan: Bagi setiap perkebunan di lahan deforestasi, sebelum batas tanggal tersebut, produksi komoditas akan terklasifikasi sebagai 'berkelanjutan'. Tahun 2000 diusulkan sebagai batas waktu yang ditentukan, mengingat perubahan dalam sistem tata kelola Indonesia pada periode tersebut. |



Seorang petani memetik biji kopi di sebuah kebun di Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Foto: Aulia Erlangga/
CIFOR

Menguji, menyempurnakan, dan menerapkan indikator dan sistem pemantauan

Fase proyek Terpercaya selanjutnya akan menguji 22 indikator untuk memastikan bahwa indikator tersebut relevan dan data tersedia untuk verifikasi obyektif. Setelah proses pengujian, indikator dapat direvisi atau diubah sesuai kebutuhan. Panduan kemudian akan disusun untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memahami dan memverifikasi indikator.

Suatu lembaga pemerintah Indonesia sendiri adalah yang paling cocok untuk menjadi tuan rumah sistem pemantauan kinerja yurisdiksi, memantau indikator dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut akan memastikan bahwa indikator-indikator secara objektif mencerminkan keberlanjutan tingkat Pemerintah Daerah dan memengaruhi proses pembangunan Pemerintah Daerah. Platform data terpusat untuk mengumpulkan dan mensosialisasikan informasi tentang indikator, dan menyediakan cara sederhana untuk mengevaluasi dan membandingkan yurisdiksi akan membentuk fitur inti dalam sistem.

Indikator dapat dikaitkan dengan proses perencanaan pemerintah pusat, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), atau dengan panduan untuk produksi minyak sawit berkelanjutan sebagai cara untuk mempercepat peralihan ke tahap keberlanjutan.

Terpercaya: Sebuah Cetak Biru untuk produksi dan perdagangan minyak sawit

Proyek Terpercaya telah menjadi proses menyeluruh dan melibatkan pemangku kepentingan multi-pihak yang menjabarkan cetak biru untuk produksi dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan dan inklusif. Indikator didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menawarkan pendekatan yang saling menguntungkan antara negara produsen dan konsumen. Indikator dan sistem pemantauan kinerja yurisdiksi menyediakan insentif bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata kelola lahan dan hutan mereka, antara lain melalui penegakan hukum, untuk memastikan bahwa deforestasi dan kerusakan lingkungan berkurang sementara komunitas lokal terlibat secara adil dan pertumbuhan ekonomi terjaga. Pada saat yang sama, sektor swasta akan mendapat manfaat dari terwujudnya situasi yang adil dan setara bagi seluruh produsen dalam yurisdiksi, sementara perusahaan yang berkomitmen untuk keberlanjutan juga dapat memetik manfaat akses terhadap produksi para petani kecil karena mereka terintegrasi ke dalam rantai pasok berkelanjutan.

Indikator-indikator Terpercaya dan sistem pemantauan kinerja yurisdiksi berpotensi untuk menginformasikan dialog antara Uni Eropa dan Indonesia tentang produksi komoditas berkelanjutan dan mendorong perusahaan untuk mendapatkan komoditas dari yurisdiksi berkelanjutan.

Gambar sampul: Pemanen kelapa sawit di Indonesia. Foto: Lucy McHugh/CIFOR

Informasi lebih lanjut di info.terpercaya@efi.int

Pernyataan Penyangkalan

Pengarahan ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari Partnership Instrument (Instrumen Kemitraan) Uni Eropa. Isi briefing ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak bisa dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

Juli 2019.

